

# **PENGARUH PENAGIHAN PAJAK MENGGUNAKAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP JUMLAH TUNGGAKAN PAJAK**

**(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)**

## **SKRIPSI**

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**DWI FITRI KURNIAWATI  
NIM. 135030401111075**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN  
MALANG  
2017**

## TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 4 Oktober 2017

Jam : 09.00

Skripsi atas nama : Dwi Fitri Kurniawati

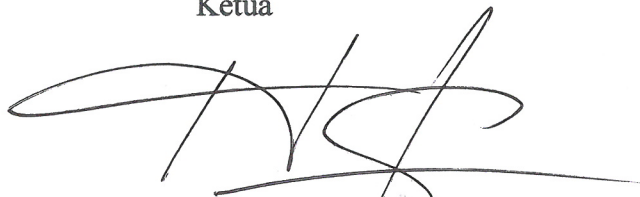
Judul : Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)

Dan dinyatakan

**LULUS**

Majelis Penguji

Ketua



**Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si**  
**NIP. 195707121985031001**

Anggota



**Ari Darmawan, Dr, SAB, MAB**  
**NIP. 2012018009141001**

Anggota



**Dessanti Putri Sekti Ari, SE, MSA, AK**  
**NIP. 19881223 201504 2 001**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran  
dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggal Pajak (Studi  
Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)

Disusun oleh : Dwi Fitri Kurniawati

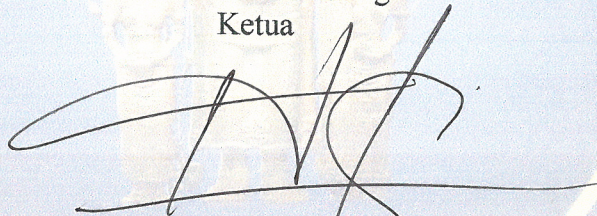
NIM : 135030401111075

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Administrasi Perpajakan

Malang, 20 September 2017

Komisi Pembimbing  
Ketua



**Dr.Drs Muhammad Saifi, M.Si**  
**NIP. 195707121985031001**

## PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini dapat digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No.20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 Pasal 70.

Malang, 20 September 2017



Dwi Fitri Kurniawati  
NIM. 135030401111075



## CURICULUM VITAE

Nama : Dwi Fitri Kurniawati  
NIP : 135030401111075  
Tempat Tanggal Lahir : Bojonegoro, 10 Mei 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Nomer Telepon : 085740547020  
Email : [niafitri10@gmail.com](mailto:niafitri10@gmail.com)  
Pendidikan : 1. 2000-2002 (TK TUNAS RIMBA)  
2. 2002-2007 (SD DENGOK 2)  
3. 2007-2010 (SMP 1 PADANGAN)  
4. 2010-2013 (SMA 1 CEPU)  
5. 2013 – 2017 (Universitas Brawijaya)



## RINGKASAN

Dwi Fitri Kurniawati, 2017, **Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak** (Studi pada KPP Madya Malang), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si.

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Dalam melaksanakan Penagihan pajak aparaturnya Direktorat Jenderal Pajak melakukan upaya agar wajib pajak melunasi utang pajaknya. Maka dari itu pemerintah terus melakukan upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dalam pelaksanaan penagihan pajak.

Sehubungan dengan masalah tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian terhadap hal-hal apa saja yang mempengaruhi penagihan pajak, khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa baik secara simultan maupun parsial.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian (explanatory research) dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang selama 3 tahun (36 bulan). Uji statistik yang digunakan adalah regresi berganda dan data diolah dengan menggunakan program SPSS.

Penelitian ini membuktikan bahwa jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang dipengaruhi oleh surat teguran dan surat paksa yang ditandai dengan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

*Kata kunci: Penagihan Pajak, Surat Teguran, Surat Paksa, Jumlah Tunggakan Pajak*

## SUMMARY

Dwi Fitri Kurniawati, 2017, The Effect of Tax Billing using Warning and Force Letter against Total Tax Arrears (Study at KPP Madya Malang), Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si.

Tax Billing is actions to allow taxpayers to pay tax debt and tax billing cost by warning, billing real time, notifying force letter, proposing prevention, foreclosures, selling confiscated goods. To implementation taxbilling, Directorate General Pajak Officer make efforts to taxpayer pay off his tax debt. Therefore the government continues to make efforts to optimize tax revenue in the implementation of tax billing.

In connection with the problem, the authors are interesting to research about affect tax billing, especially in KPP Madya Malang. This research intend to knowing what the total tax debt in KPP Madya Malang influenced by tax billing using warning and force either simultaneously or partially.

The type of research conducted is research (explanatory research) with case study approach. This research uses quantitative data by using secondary data from KPP Madya Malang for 3 years (36 months). Statistical test used is multiple regression and data processed by using SPSS program.

This research proves that the total of tax debt in KPP Madya Malang influenced by warning and force letter marked with Warning Letter or other similar letter is a letter which publish by the direction to warning to the Taxpayer for pay off the debt until with payment due date.

Keywords: Tax Billing, Warning Letter, Forced Letter, Tax Arrears

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta nikmat yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang) dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelas Sarjana pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriono, MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si, selaku ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Drs. Muhammad Saifi, M.Si, selaku dosen pembimbing yang telah membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini dengan penuh tanggung jawab.



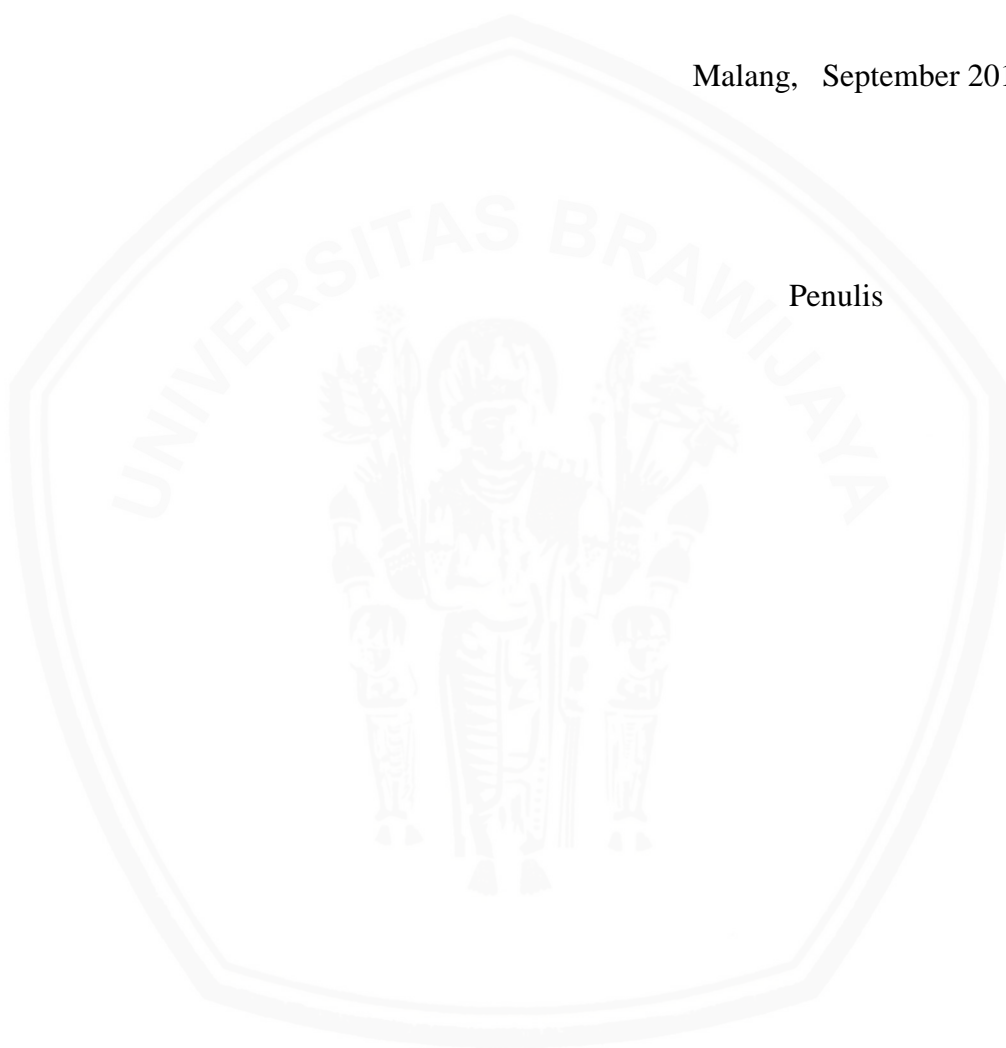
4. Seluruh dosen administrasi bisnis yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi yang telah memberikan pelayanan prima kepada peneliti sehingga kepengurusan administrasi penyusunan skripsi ini menjadi lancar .
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan dukungan motivasi dan memberikan doa restunya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Suami tercinta dan bapak dari anak saya ayra yang senantiasa memberikan segala baik itu materi maupun non materi, memberikan kasih sayang, motivasi dan dorongannya agar saya dapat menyelesaikan kuliah dan segera berkumpul.
8. Anakku tercinta ayra yang selalu mengingatkan saya untuk segera menyelesaikan kuliah agar dapat berkumpul dengan suami saya.
9. Seluruh teman-teman pajak angkatan 2013 yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi dan segera lulus kuliah.
10. Sahabatku Rukayah dan Diana Safitri dari teman awal masuk kuliah yang selalu menyemangati saya agar segera lulus kuliah.
11. Seluruh teman pajak D angkatan 2013 yang selalu memberikan masukan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih besar atas kebaikan yang diberikan pada penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini

masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Malang, September 2017

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I            PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Kontribusi Penelitian.....	10
E. Sistematika Penelitian.....	11
 <b>BAB II            KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Empiris.....	13
B. Tinjauan Teoritis.....	16
1. Dasar-dasar Pajak.....	16
(a) Pengertian Pajak.....	16
(b) Fungsi Pajak.....	18
(1) Fungsi Budgetair.....	18
(2) Fungsi Regulair.....	18
(c) Sistem Pemungutan Pajak.....	18
(1) Official Assessment System.....	18
(2) Self Assessment System.....	19
(3) With Holding System.....	19
(d) Hambatan Pemungutan Pajak.....	20
(1) Perlawanan pasif.....	20
(2) Perlawanan aktif.....	20
2. Penagihan Pajak.....	20
(a) Pengertian Penagihan Pajak.....	20
(b) Bentuk Penagihan Pajak.....	22

(1) Penagihan Aktif.....	22
(2) Penagihan Pasif.....	23
(c) Dasar Penagihan Pajak.....	23
(d) Jadwal Penagihan Pajak.....	24
(e) Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	26
(1) Penagihan Pajak dengan Surat Teguran.....	26
(a) Pengertian Surat Teguran.....	26
(b) Penerbitan Surat Teguran.....	27
(c) Penyampaian Surat Teguran.....	27
(2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.....	28
(a) Pengertian Surat Paksa.....	28
(b) Penerbitan Surat Paksa.....	28
(c) Pemberitahuan Surat Paksa.....	29
(f) Daluwarsa Penagihan Pajak.....	31
(g) Jangka Waktu hak Penagihan.....	31
(h) Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak.....	32
3. Tunggakan Pajak.....	33
(a) Pengertian Tunggakan Pajak.....	33
C. Model Konsep dan Hipotesis.....	34
1. Model Konsep.....	34
2. Model Hipotesis.....	35
2.1 Hipotesis Penelitian.....	36
2.1.1 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran terhadap Jumlah Tunggakan Pajak.....	36
2.1.2 Pengaruh Penerbitan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak.....	37

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Lokasi Penelitian.....	39
C. Variabel dan pengukurannya.....	39
1. Variabel.....	39
(a) Variabel Independen.....	39
(b) Variabel Dependen.....	40
2. Definisi Operasional Variabel.....	41
D. Populasi dan Sampel.....	41
1. Populasi.....	41
2. Sampel.....	42

E. Jenis dan Sumber Data .....	42
1. Jenis Data .....	42
2. Sumber Data .....	43
F. Teknik Analisis Data .....	43
1. Analisis Statistik Deskriptif .....	43
2. Uji Asumsi Klasik .....	44
(a) Uji Normalitas .....	44
(b) Uji Multikolonieritas .....	45
(c) Uji Heteroskedastisitas .....	46
(d) Uji Autokolerasi .....	47
3. Uji Hipotesis .....	48
1) Uji Simultan .....	48
2) Koefisien Determinasi .....	49
3) Uji Parsial .....	49
4. Analisis Regresi Linier Berganda .....	50
 <b>BAB IV</b>	
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Umum KPP Madya Malang .....	51
B. Deskripsi Data Penelitian .....	58
C. Hasil Statistik Deskriptif .....	59
D. Pengujian asumsi Klasik .....	59
E. Pengujian Hipotesis .....	66
F. Analisis Regresi Linier Berganda .....	71
G. Hasil Uji Dominan .....	72
H. Analisis dan Pembahasan .....	73
 <b>BAB V</b>	
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
C. Keterbatasan .....	78
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>80</b>
 <b>LAMPIRAN</b> .....	<b>82</b>

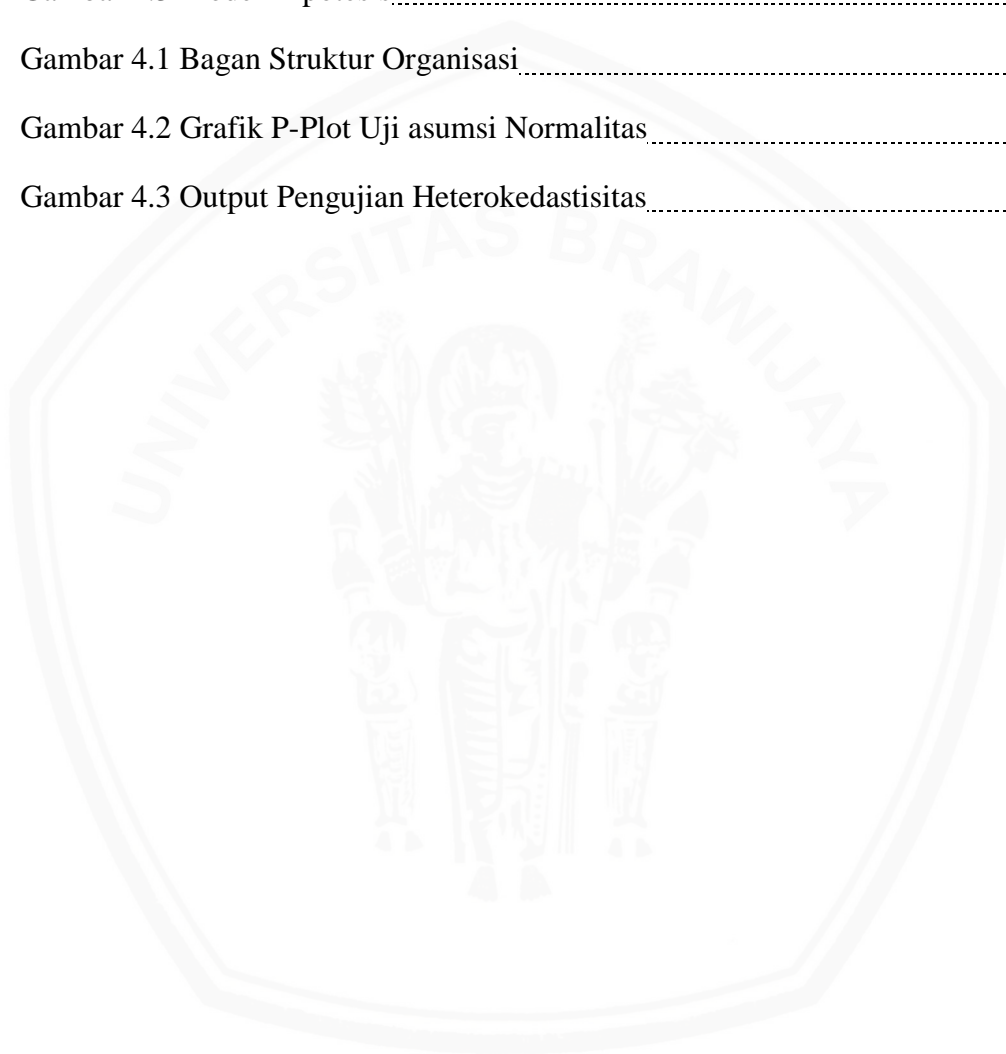


## DAFTAR TABEL

	hal
Tabel 2.1 Penelitian terdahulu.....	15
Tabel 2.2 Jadwal Penagihan Pajak.....	25
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	41
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	59
Tabel 4.2 Output Pengujian Normalitas.....	61
Tabel 4.3 Uji Asumsi Multikolinieritas.....	63
Tabel 4.4 Output Pengujian Autokorelasi.....	66
Tabel 4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	67
Tabel 4.6 Koefisien determinasi.....	68
Tabel 4.7 Internal Koefisien .....	69
Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t).....	69
Tabel 4.9 Rekapitulasi hasil regresi.....	71
Tabel 4.10 Hasil Uji Dominan .....	73

## DAFTAR GAMBAR

	hal
Gambar 2.1 Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak.....	26
Gambar 2.2 Model Konsep.....	34
Gambar 2.3 Model Hipotesis.....	35
Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi.....	55
Gambar 4.2 Grafik P-Plot Uji asumsi Normalitas.....	62
Gambar 4.3 Output Pengujian Heterokedastisitas.....	65



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Pemerintah merealisasikan tujuan tersebut untuk dilaksanakan di seluruh tanah air menggunakan biaya yang cukup besar. Salah satu penerimaan dana terbesar dalam membiayai pembangunan nasional berasal dari sektor pajak.

Pendapatan dari pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pembelanjaan rutin negara dan kegiatan dalam pembangunan nasional. Serta peran masyarakat dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perlu ditingkatkan dengan cara mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Peraturan perundang-undangan ketentuan pajak yang dimaksudkan untuk lebih memberikan keadilan, memberikan pelayanan wajib pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum.

Usaha dalam peningkatan penerimaan pajak, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan usaha guna mengoptimalkan penerimaan di sektor pajak melalui kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan. Salah satu langkah yang diambil Direktorat Jenderal Pajak adalah melakukan

reformasi di bidang perpajakan (*tax reform*), yaitu reformasi perpajakan tahun 1983 dengan melakukan perubahan sistem pemungutan pajak dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self Assesment System* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya (Rahayu, 2008:101-106). *Self Assesment system* menuntut wajib pajak untuk ikut berpartisipasi secara aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya dalam hal menghitung, menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang. Kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak dalam *Self Assesment System* ini diharapkan dapat berjala sesuai dengan yang semestinya sehingga bisa meminimalisir adanya kemungkinan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Pelaksanaan *self assesment system* tidak menutup kemungkinan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya. Tidak menutup kemungkinan dalam persepsi Wajib Pajak terdapat anggapan bahwa pajak merupakan sebagian beban atau kewajiban yang memaksa bagi Wajib Pajak, karena aset atau harta kekayaan yang diterima atau diperolehnya harus dipotong untuk pembayaran pajak atas barang yang dimiliki atau penghasilan yang diterimanya. Adanya suatu kewajiban yang sifatnya memaksa tersebut yang kemungkinan dapat menyebabkan Wajib pajak memiliki keengganan maupun kelalaian dalam melakukan kewajiban perpajakannya.

Pajak yang tidak dibayar atau belum dilunasi melebihi masa jatuh tempo pembayaran dapat menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Berdasarkan ajaran materiil pada *Self Assesment System*, jika suatu peristiwa, keadaan, atau perbuatan yang menyebabkan terjadinya tunggakan pajak seperti tidak membayar pajak, maka saat itu juga wajib pajak memiliki tunggakan pajak. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan masyarakat terutama wajib pajak mengerti tentang manfaat dan tujuan dari pajak sehingga masyarakat sadar akan pajak dan tidak dijumpai adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pelaksanaan pembayaran pajak dalam kenyataannya masih ada wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajiban perpajakannya dalam melaksanakan pembayaran pajak sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Pada praktiknya sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak, hal ini disebabkan karena Wajib Pajak belum melakukan pembayaran atau karena sebab lain seperti merasa enggan untuk membayar pajak atau karena kondisi keuangan yang tidak mendukung, kurangnya pemahaman (perubahan UU Perpajakan), dan kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam hal membayar pajak, sehingga menimbulkan adanya tunggakan pajak. Perkembangan jumlah tunggakan pembayaran pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar, peningkatan jumlah tunggakan ini masih belum dapat diimbangi dengan peningkatan jumlah penerimaan dari penagihan pajaknya (Suandy, 2011:128).

Untuk mengamankan penerimaan negara dan meminimalisir wajib pajakmenunggak dalam pembayaran pajaknya, pemerintah khususnya Direktorat



Jenderal Pajak melakukan tindakan penagihan pajak untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut dengan kekuatan hukum yang memaksa berupa peraturan perundangundangan, pencairan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini, penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal, apabila kekurangan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak tersebut sampai dengan jatuh tempo, maka penagihan pajak dianggap perlu untuk dilaksanakan sebagai salah satu upaya pencapaian penerimaan pajak, adapun dalam pelaksanaan penagihan pajak tersebut turut melibatkan peran aktif dari aparaturnya pajak (Diana Sari, 2013:264).

Tindakan penagihan yang berpotensi memberikan pencairan tunggakan pajak antara lain melalui penagihan pajak aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak, penagihan pajak aktif dimulai dengan diterbitkannya Surat Teguran yang dikirimkan ke Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak dan tidak membayarnya dalam waktu tujuh hari setelah diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak, Surat Teguran yang dikirim bertujuan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak agar membayar hutang pajaknya, penagihan pajak dengan Surat Teguran diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas pencairan tunggakan pajak, apabila dengan Surat Teguran wajib pajak masih belum membayar pajaknya maka diberikan Surat Paksa, Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Mardiasmo, 2011:127).

Pelaksanaan penagihan pajak merupakan suatu langkah yang ditempuh oleh Direktorat Jendral Pajak dalam merealisasikan target penerimaan atas tunggakan pajak. Penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan perpajakan yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (UU PPSP). Surat paksa dalam hal ini adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Siahaan, 2004:390).

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita (Suandy, 2008:173). Tindakan tersebut berupa penagihan pajak pasif melalui himbauan dengan menggunakan surat tagihan atau surat ketetapan pajak. Dan selanjutnya berupa penagihan pajak aktif yang meliputi penerbitan surat teguran, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan dengan dua cara yaitu penagihan pajak pasif dan aktif. Penagihan pajak pasif dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo melalui himbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya. Penagihan pajak aktif dilakukan setelah tanggal jatuh tempo

dengan diterbitkannya Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP) hingga pelaksanaan penjualan barang yang disita melalui lelang atas barang milik penanggung pajak (Kurniawan dan Pamungkas, 2006:8). Penelitian ini hanya meneliti penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.

Prosedur penagihan pajak aktif dilakukan oleh fiskus diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Penerbitan Surat Teguran dilakukan saat Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak, Surat Ketetapan Pajak kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding belum dibayar juga dibayar atau dilunasi 7 (tujuh) hari dari batas waktu jatuh tempo pelunasan. Apabila dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Teguran, namun wajib pajak tidak membayar tunggakan pajaknya maka fiskus akan menerbitkan Surat Paksa. Penerbitan Surat Paksa ini mewajibkan penanggung pajak melunasi tunggakan pajaknya dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal diterbitkannya Surat Paksa. Tunggakan pajak yang tidak dilunasi setelah jangka waktu 2 x 24 jam tersebut, maka akan dilakukan penyitaan dengan menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan (Ilyas, 2013:430). Tindakan Pelaksanaan penagihan pajak dilakukan pada semua wajib pajak termasuk wajib pajak yang ada di wilayah kota Malang.

Kota Malang adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang yang terletak pada ketinggian antara 440 – 667 meter diatas permukaan air laut, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim yang dimiliki ([www.malangkota.go.id](http://www.malangkota.go.id)). Kota ini

terletak 90 km sebelah selatan Surabaya dan merupakan kota terbesar di kedua di Jawa Timur setelah Surabaya, serta merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia menurut jumlah penduduk. Luas wilayah kota Malang adalah 252,10 km<sup>2</sup>. Bersama dengan Kota Batu dan Kabupaten Malang, Kota Malang merupakan bagian dari kesatuan wilayah yang dikenal dengan Malang Raya (Wilayah Metropolitan Malang). Wilayah Malang Raya yang berpenduduk sekitar 4 juta jiwa, adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Jawa Timur setelah Gerbangkertosusila. Kawasan Malang Raya dikenal sebagai salah satu daerah tujuan wisata utama di Indonesia ([https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang)). Wilayah Kota Malang yang semakin berkembang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Malang serta mampu memberikan potensi penerimaan pajak secara optimal. Serta keberadaan industri-industri kecil yang mulai berkembang di Kota Malang juga sebagai salah satu meningkatnya potensi penerimaan pajak. Pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi masyarakat Kota Malang oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang merupakan unit kerja Direktorat Jendral Pajak yang memberikan Pelayanan di bidang perpajakan untuk seluruh masyarakat Kota Malang yang belum maupun sudah mendaftarkan sebagai wajib pajak. KPP Madya Malang adalah salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang berada di Kota Malang. KPP Madya Malang selain memberikan pelayanan di bidang perpajakan bagi Wajib Pajak juga berupaya untuk menggali potensi penerimaan pajak sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak.

Faktor yang mengakibatkan wajib pajak menunggak membayar pajaknya dikarenakan banyak Wajib Pajak yang tempat tinggalnya pindah ataupun tidak mencantumkan alamat secara jelas, sehingga membuat Juru Sita Pajak mengalami kendala untuk melakukan penagihan pajak. Tunggakan pajak yang meningkat ini belum dapat mengimbangi pencairannya, sehingga mengakibatkan target pajak yang diinginkan tidak tercapai dengan maksimal. Jika seluruh Wajib Pajak sudah melaksanakan fungsi *self assesment system* dengan baik dan benar, jujur dan bertanggungjawab, mungkin petugas tidak akan mengalami kesulitan dalam melaksanakan tugasnya. Selanjutnya para petugas melakukan tindakan peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyelesaikan kekurangan pajaknya. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan cara mengirimkan surat teguran, apabila ternyata sampai pada batas waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak menanggapi surat tersebut maka tindakan selanjutnya yang akan dilakukan adalah dengan surat paksa. Serta tindakan-tindakan lainnya dalam melaksanakan pencairan sampai tuntas.

Faktor lain diantaranya kendala yang paling sering dialami para petugas pajak adalah alamat Wajib Pajak yang tidak tepat, Wajib Pajak yang pindah tempat tinggal dan tidak memberitahukan ke KPP setempat, atau Wajib Pajak menghilang tanpa jejak, melarikan diri, serta Wajib Pajak yang berbeli-belit dalam memberikan informasi pada saat petugas melakukan pemeriksaan, atau dikarenakan data pajak yang hilang sehingga petugas kesulitan melakukan penagihan. Sehubungan dengan hal itu, aparat pajak dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh berbagai faktor penunjang. Salah satunya adalah



menerapkan langkah strategi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang terutang sesuai dengan prosedur penagihan, sehingga tercapainya pencairan tunggakan pajak yang semestinya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan masalah tersebut, maka peneliti timbul suatu ketertarikan untuk melakukan penelitian guna untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak aktif terhadap jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ )?
2. Apakah Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ )?
3. Manakah diantara Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) yang berpengaruh paling dominan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ )?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) secara parsial terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ ).
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) secara simultan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ ).
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan variabel yang paling dominan diantara Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ ).

**D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

**1. Kontribusi Akademis**

- a. Sebagai bahan informasi yang lebih luas bagi pembaca mengenai penagihan pajak aktif melalui penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa
- b. Sebagai tambahan referensi dan pembandingan bagi penelitian yang dilakukan dimasa mendatang

**2. Kontribusi Praktis**

- a. Sebagai bahan informasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dalam bidang penagihan pajak aktif, dalam hal penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- b. Sebagai bahan masukan dalam pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang dalam tindakan penagihan pajak aktif sehingga pelaksanaan pajak dapat berjalan secara optimal.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai penulisan skripsi ini maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kajian teori yang diperlukan di dalam menunjang penelitian dan konsep yang relevan untuk membahas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka meliputi penelitian terdahulu, landasan teori mengenai judul yang diambil serta kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis rumusan masalah penelitian yang meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber, data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menguraikan hasil dari penelitian yang diperoleh kemudian membahas hasil penelitian tersebut.

## BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan akhir dari hasil penelitian yang diperoleh dari peneliti dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak terkait, serta mengemukakan tentang keterbatasan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Empiris**

Tinjauan empiris yang berisikan tentang hasil penelitian-penelitian terdahulu yang sudah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu yang berfungsi untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan saat ini. Berikut ini hasil dari penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Penelitian Velayati (2013)**

Penelitian yang dilakukan oleh Velayati (2013) yang berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu selama tahun 2010-2012. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa tergolong tidak efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak masih sangat kurang.



## 2. **Penelitian Rifqiansyah (2014)**

Penelitian yang dilakukan oleh Rifqiansyah (2014) berjudul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggalan Pajak ( Studi kasus di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Malang Utara 2011-2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi tindakan penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggalan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara selama tahun 2011-2013. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penagihan pajak aktif masih belum efektif, selain itu kontribusi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggalan pajak masih sangat kurang.

## 3. **Penelitian Rizki Yuslam Primerdo (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Yuslam Primero (2015) dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak pada (KPP) Pratama Surakarta. Penerapan *Self Assessment System* dalam memungut pajak di Indonesia, tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan pajak dan penagihan pajak merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Penelitian ini

merupakan penelitian dengan data sekunder. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan Pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak selain itu Penagihan pajak berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
1	Mala Rizkika Velayati (2013)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu Tahun 2010-2012)	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Batu b. Objek penelitian meliputi Surat Teguran dan Surat paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak c. Periode yang diteliti adalah 2010-2012	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Madya Malang b. Objek penelitian meliputi Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak c. Periode yang diteliti adalah 2014-2016
2	Hasbi Rifqiansyah (2014)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013)	a. Lokasi penelitian di KPP Pratama Malang Utara b. Objek penelitian meliputi penagihan pajak aktif terhadap pencairan tunggakan pajak c. Periode yang	a. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Madya Malang b. Objek penelitian meliputi Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak

**Lanjutan Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Ini
			diteliti adalah 2011-2013	c.Periode yang diteliti adalah 2014-2016
3	Rizki Yuslam Primerdo (2015)	Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)	a.Lokasi penelitian di KPP Pratama Surakarta b.Objek penelitian meliputi penagihan pajak terhadap efektivitas penerimaan pajak c.Periode yang diteliti adalah	a.Lokasi penelitian dilakukan di KPP Madya Malang b.Objek penelitian meliputi Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggalan Pajak c.Periode yang diteliti adalah 2014-2016

Sumber : Data diolah

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Dasar-Dasar Pajak**

#### **a. Pengertian Pajak**

Sumber pembiayaan negara yang terbesar berasal dari iuran wajib yang secara rutin telah kita setorkan kepada negara yang sekarang kita sebut dengan pajak. Setoran pajak yang telah disetorkan kepada negara tidak dapat dirasakan secara langsung manfaatnya, tapi hasil dari pajak dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas lagi. Pemerintah juga telah mengeluarkan undang-undang perpajakan yang semakin memperjelas bagaimana proses perpajakan di Indonesia. Tindakan

pemungutan pajak di Indonesia semakin kuat dan jelas untuk dilaksanakan, dan pemerintah juga tidak sewenang-wenang untuk memungut pajak. Pembayaran pajak diperlukan juga dengan kesadaran dari masyarakat dan peran aktif pemerintah (fiskus) untuk mencapai pendapatan pajak yang optimal.

Berdasarkan undang-undang No 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat atas undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, sesuai pasal 1 ayat (1) Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH dalam bukunya Mardiasmo (2016: 1) menyatakan bahwa “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Berdasarkan definisi tentang pajak tersebut dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan suatu bentuk iuran yang dipungut dari masyarakat berdasarkan aturan perundang-undangan perpajakan serta atas pembayaran tidak memperoleh timbal balik secara langsung pada individu, namun digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna kesejahteraan semua masyarakat.

## **b. Fungsi Pajak**

Pajak memiliki 2 (dua) fungsi yaitu fungsi *budgetair* (pendanaan), dan juga fungsi *regulasi* (mengatur), Menurut Priantara (2013:4), sebagai berikut :

### **1) Fungsi *budgetair* (pendanaan)**

disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### **2) Fungsi *regulair* (mengatur)**

disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi Pemerintah, selain itu sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

## **c. Sistem Pemungutan Pajak**

Menurut Mardiasmo, (2011:7) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu *Self Assesment System*, *Official Assesment System* dan *Withholding Tax System*, yaitu sebagai berikut :

### **1. *Official Assessment System***

Adalah suatu sistem pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## **2. *Self Assessment System***

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyeter dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

## **3. *With Holding System***

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri -cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).



#### **d. Hambatan Pemungutan Pajak**

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2005:9) yaitu :

##### **1. Perlawanan pasif**

Perlawanan pasif meliputi membayar pajak yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

##### **2. Perlawanan aktif**

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

- a. Tax avoidance yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. Tax evasion yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak)

#### **2. Penagihan Pajak**

##### **a. Pengertian Penagihan Pajak**

Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,

melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Adapun penagihan pajak menurut Priantara (2013:110) menyatakan bahwa penagihan pajak adalah suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar wajib pajak atau penanggung pajak baik dengan cara lembut atau persuasif dan administrasi hingga cara penyitaan dan pelelangan. Dengan adanya utang pajak, maka wajib pajak wajib melunasi utang pajak tersebut sesuai dengan besarnya jumlah yang terutang dan berdasarkan waktu yang telah ditetapkan.

Menurut (Moeljo Hadi,2001) yang dimaksud dengan penagihan adalah “Serangkaian tindakan dari aparatur Direktorat Jenderal Pajak berhubung Wajib Pajak tidak melunasi baik sebagian atau seluruh kewajiban perpajakan yang terutang menurut Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”. Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penagihan adalah “Perbuatan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Perpajakan khususnya mengenai pembayaran pajak”. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diketahui bahwa pada dasarnya proses penagihan pajak melibatkan beberapa unsur-unsur yang mempunyai arti yang cukup penting, diantaranya yaitu:

1. Utang pajak, yaitu “Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga , denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2. Serangkaian tindakan dilakukan sesuai jadwal waktu yang benar, yaitu penerbitan Surat Teguran, pemberitahuan Surat Paksa, pelaksanaan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), sampai dengan pelaksanaan lelang.
3. Aparat Direktorat Jendral Pajak, yaitu Jurusita Pajak yang telah memenuhi syarat untuk melakukan penagihan pajak.
4. Penanggung pajak yang mempunyai kewajiban melunasi utang pajak.
5. Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, yaitu UU KUP 1984 dan UU PPSP serta peraturan pelaksanaan yang mengaturnya.

Terdapat dua jenis kegiatan penagihan pajak yang dikenal secara umum, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pajak pasif adalah keseluruhan kegiatan penagihan di luar penagihan pajak aktif dimana seksi penagihan tidak melakukan tindakan yang nyata terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak agar melunasi utang pajak.

#### **b. Bentuk penagihan Pajak**

Tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus memiliki dua bentuk penagihan pajak yaitu penagihan pajak secara aktif dan penagihan pajak secara pasif (Kurniawan dan Pamungkas, 2006:8), sebagai berikut :

##### **1) Penagihan Aktif**

Penagihan pajak aktif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) atau sejenisnya, keputusan pembetulan,

keputusan keberatan, putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar tidak dilunasi oleh wajib pajak sehingga diterbitkan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan hingga melaksanakan penjualan barang yang disita melalui lelang barang milik penanggung pajak.

## **2) Penagihan Pasif**

Penagihan pajak pasif yaitu penagihan yang dilakukan oleh fiskus sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran dari Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau sejenisnya, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang kurang dibayar melalui imbauan, baik dengan surat maupun dengan telepon atau media lainnya.

### **c. Dasar Penagihan Pajak**

Penagihan pajak memiliki dasar acuan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan penagihan. Dasar Penagihan Pajak menurut pasal 18 ayat (1) dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Surat tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau sejenisnya, Keputusan Pembetulan, Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, merupakan dasar penagihan pajak”.

Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak akan dilakukan penelitian oleh pemerintah (fiskus) guna mengetahui adanya adanya wajib pajak yang tidak melunasi pajaknya atau membayar pajak yang tidak sesuai dengan yang semestinya, hal ini selanjutnya akan dilaksanakan proses penagihan pajak. Penagihan pajak hendaknya menggunakan dasar-dasar yang digunakan dalam penagihan pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan (Siahaan, 2004:288), antara lain:

- 1) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar (pasal 1 angka 16 UU KUP).
- 2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)  
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan (pasal 1 angka 17 UU KUP).
- 3) Surat Tagihan Pajak  
Surat Tagihan pajak (STP) sesuai pasal 1 angka 20 UU KUP menyatakan bahwa STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
- 4) Keputusan Keberatan yang mengakibatkan Pajak Terutang Bertambah  
Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak (pasal 1 angka 34 UU KUP)
- 5) Surat Keputusan Banding yang Menyebabkan Pajak terutang Bertambah  
Putusan Banding adalah putusan badan pengadilan pajak atau banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak (pasal 1 angka 35 UU KUP)
- 6) Keputusan Pembetulan yang mengakibatkan Pajak Terutang Bertambah  
Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat tagihan Pajak, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (Pasal 1 angka 33 UU KUP).

#### **d. Jadwal Pengihan pajak**

Tindakan Penagihan Pajak memiliki prosedur pelaksanaannya berdasarkan urutan proses pelaksanaannya, alasan dilakukannya tindakan penagihan tersebut, dan waktu pelaksanaannya. Jadwal Proses penagihan pajak menurut Ilyas (2013:427):

**Tabel 2.2 Jadwal Penagihan Pajak**

No	Jenis Tindakan Penagihan	Waktu Pelaksanaan
1	Perbitan Teguran peringatan lain yang sejenis. (pasal 8 sampai pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 24/PMK.03/2008)	7 (tujuh) hari sejak Saat jatuh tempo
	Penerbitan Surat Paksa (pasal 7 UU No.19/2000 dan Pasal 15 sampai pasal 23 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:24/PMK.03/2008).	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
	Penerbitan Surat Perintah Melakukannya Penyitaan (Pasal 12 UU No. 19/2000)	Setelah lewat 2X24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada penanggung pajak
	Pengumuman Lelang (pasal 26 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:24/PMK.03/2008)	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan.
	Penjualan/Pelelangan Barang Sitaan (UU No.19/2000 pasal 26, pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor:24/PMK.03/2008)	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

Sumber: Iiyas (2013:427)

Berdasarkan pada tabel 2 tersebut, maka disajikan gambar 1 tentang alur dan jadwal penagihan pajak untuk lebih memudahkan dalam memahami alur dan jadwal penagihan pajak. Berikut ini merupakan alur dan jadwal penagihan pajak secara singkat dapat dilihat dalam gambar 2.1 sebagai berikut :



Gambar 2.1 : Alur dan Jadwal Pelaksanaan Penagihan Pajak



Sumber : [www.slideserve.com/trang/alur-dan-jadwal-pelaksanaan-penagihan-pajak](http://www.slideserve.com/trang/alur-dan-jadwal-pelaksanaan-penagihan-pajak)

## e. Pelaksanaan Penagihan Pajak

### 1. Penagihan Pajak dengan surat Surat Teguran

#### a) Pengertian Surat Teguran

Tindakan penagihan pajak diawali dengan penerbitan Surat Teguran. Sesuai dengan Pasal 8 angka 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat

lainnya yang sejenis ini dilakukan oleh Pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis tidak diterbitkan apabila kepada Penanggung Pajak telah diberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Wajib Pajak harus terlebih dahulu mengajukan surat permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran utang pajak. Siahaan (2004:388) menyatakan bahwa “Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Pengertian dari surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang memiliki fungsi sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan.

b) Penerbitan Surat Teguran

Berdasarkan Pasal 5 Keputusan Menteri Keuangan Nomor.561/KMK.04/2000 tentang tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa dalam Iiyas (2013:430), menyatakan bahwa “Surat Teguran diterbitkan setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran, dan tidak diterbitkan terhadap persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak”.

c) Penyampaian Surat Teguran

Penyampaian Surat Teguran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jendral Pajak berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.85/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan

Penagihan Seketika Sekaligus, menyatakan bahwa “Penyampaian Surat Teguran dapat dilakukan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat”.

## **2) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

### **a) Pengertian Surat Paksa**

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan. Surat Paksa memiliki kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127). Dalam hal ini besarnya biaya penagihan dengan Surat Paksa sebesar Rp.50.000.

### **b) Penerbitan Surat Paksa**

Penerbitan Surat Paksa sesuai pasal 8 UU PSP dalam Iiyas (2013:432) menyebutkan Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap penanggung pajak telah dilaksanakan penagihan pajak seketika dan sekaligus.
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Pada Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.85/PMK.03/2010 tentang tata Cara Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus, menyebutkan bahwa “Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak penyampaian Surat Teguran, dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita kepada penanggung pajak”.

c) Pemberitahuan surat paksa

Berdasarkan Pasal 10 s.d 15 Keputusan Menteri Keuangan Nomor.561/KMK/2000 tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa, menyebutkan bahwa Surat Paksa dilakukan oleh jurusita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada Penanggung Pajak, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Iiyas (2013:433) mengemukakan bahwa terhadap wajib pajak orang pribadi,

Surat Paksa diberitahukan kepada:

- a. Penanggung pajak ditempat tinggal, tempat usaha, atau di tempat lain yang memungkinkan.
- b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja ditempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.
- c. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
- d. Para ahli waris, apabila penanggung pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi

2. Wajib Pajak Badan

Mardiasmo (2011:128) menyatakan bahwa Surat Paksa terhadap Badan

diberitahukan oleh jurusita Pajak kepada:

- a. Pengurus, kepala perwalian, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal.
- b. Pegawai tetap ditempat kedudukan atau tempat usaha Badan, apabila Jurusita Pajak tidak dapat dijumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tersebut.

### 3. Wajib Pajak Pailit

Iiyas (2013:433) menyatakan bahwa apabila wajib pajak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, Surat Paksa diberitahukan kepada Kurator atau Balai harta peninggalan dan Hakim Pengawas yang ditetapkan. Sedangkan terhadap wajib pajak badan yang dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk melakukan pembebasan, atau likuidator, atau penerima kuasa.

### 4. Keadaan Khusus

Keadaan khusus Iiyas (2013:433), antara lain:

- a. Apabila Surat paksa tidak dapat diberitahukan kepada Wajib Pajak orang pribadi atau badan penanggung pajak, Surat Paksa disampaikan sekurang-kurangnya setingkat Sekretaris Kelurahan atau sekretaris Desa dimana Wajib Pajak bertempat tinggal atau melakukan kegiatan usahanya.
- b. Apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, atau tempat kedudukannya, pemberitahuan Surat paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman di kantor pajak yang menerbitkannya atau mengumumkan Surat Paksa tersebut melalui media massa.

### 5. Wajib pajak/penanggung pajak di luar wilayah kerja pejabat

Menurut Iiyas (2013:433), antara lain sebagai berikut:

- a. Pejabat yang menerbitkan Surat Paksa mengirimkan permintaan bantuan pelaksanaan Surat Paksa disertai Salinan surat Paksa dan Informasi mengenai wajib pajak/penanggung pajak kepada pejabat lokal pelaksanaan Surat Paksa.
- b. Pejabat lokasi pelaksanaan Surat paksa memberitahukan Surat Paksa kepada wajib pajak/penanggung pajak dimaksud sesuai prosedur baru, dan selanjutnya memberitahukan tindakan yang telah dilakukan disertai salinan atau fotokopi berita acara pemberitahuan surat paksa dan laporan pelaksanaan Surat Paksa.

**f. Daluwarsa Penagihan Pajak**

Penagihan pajak yang dilakukan oleh fiskus memiliki jangka waktu tertentu sampai dengan daluwarsa penagihan pajak, menurut Iiyas (2013:56) sesuai dengan Pasal 22 UU No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, menegaskan hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah melampaui waktu lima tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
2. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali.

Mardiasmo (2011:52) menyatakan bahwa daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

- 1) Diterbitkan Surat Paksa
- 2) Ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- 3) Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
- 4) Dilakukan penyidikan tidak pidana di bidang perpajakan.

**g. Jangka Waktu Hak Penagihan**

Pasal 22 UU KUP menyebutkan bahwa hak untuk melakukan penagihan termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak. Daluwarsa setelah melewati waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

- a. Surat Tagihan Pajak
- b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar



- c. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
- d. Surat Keputusan Pembetulan
- e. Surat Keputusan Keberatan
- f. Putusan Banding
- g. Putusan Peninjauan Kembali

Daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pembetulan, keberatan, banding atau peninjauan kembali daluwarsa penagihan pajak 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, atau peninjauan kembali.

#### **h. Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak**

Menurut Pasal 22 UU KUP, daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa
2. Ada Pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Dilakukan Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan

Daluwarsa penagihan pajak menjadi tertangguh dan dihitung 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan atau pelaksanaan kegiatan tersebut diatas

### **3. Tunggakan Pajak**

#### **a. Pengertian Tunggakan Pajak**

Pengertian Tunggakan Pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan Surat Tagihan pajak (STP) yang didalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Bnding dan Putusan Tinjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Menurut Kurniawan dan Pamungkas (2006:1) menyatakan bahwa “Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Menurut Siti Resmi (2007:40) dalam bukunya menyatakan bahwa “Tunggakan pajak adalah jumlah piutang yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan banding”.

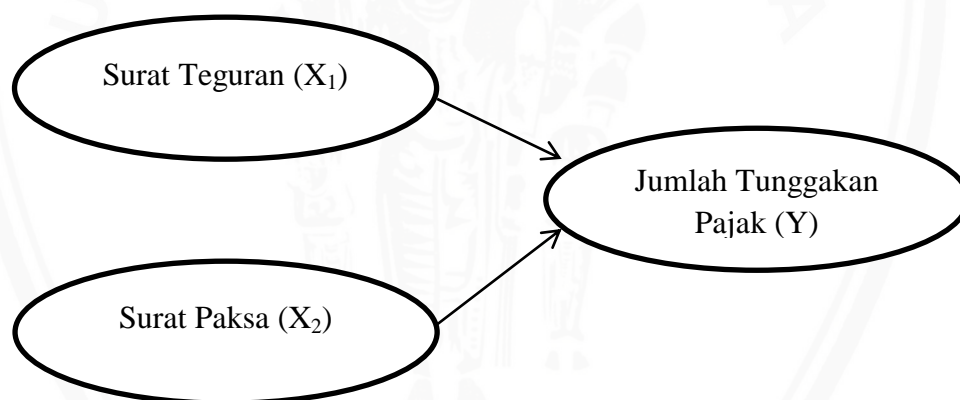
Berdasarkan dari pengertian diatas menurut para ahli dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak merupakan suatu pajak yang belum dibayarkan oleh wajib pajak pada masa tagihan pajak berdasarkan perundang-undangan perpajakan.

### C. Model Konsep dan Hipotesis

#### 1. Model Konsep

Penelitian konsepsi dapat menggambarkan suatu fenomena dengan jelas dan mudah dimengerti sesuatu yang akan diteliti. Konsep mengekspresikan suatu abstraksi yang terbentuk melalui generalisasi dari pengamatan terhadap fenomena-fenomena. “Konsep merupakan astraksi dari realitas yang tersusun dengan mengklasifikasikan fenomena-fenomena” (Indriantoro dan Supomo, 2002:58). Konsep dibuat untuk menggolongkan dan mengelompokkan obyek-obyek atau peristiwa-peristiwa yang memiliki ciri-ciri yang sama.

Gambar 2.2 Model Konsep



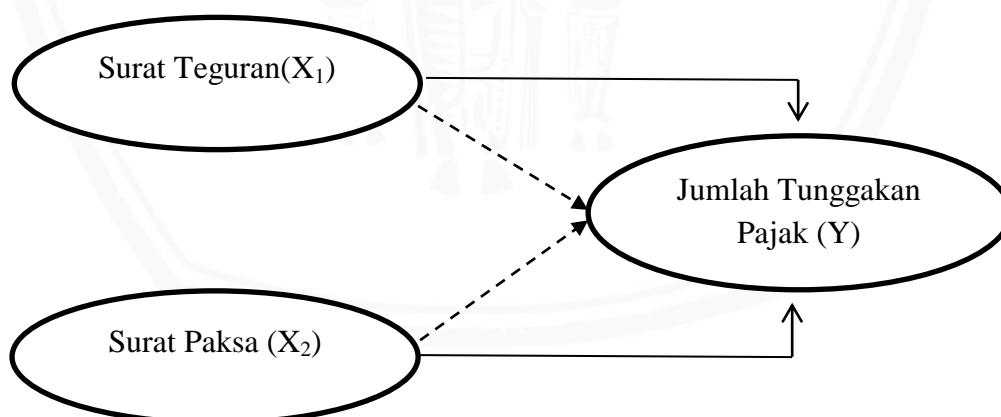
Sumber : data diolah (2017)

## 2. Hipotesis

Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Seorang peneliti harus mencari hubungan-hubungan yang menarik dan penting yang dapat menerangkan masalah yang diamati. Hubungan tersebut dikaitkan dengan teori dan hasil penelitian orang lain dan dirumuskan dalam bentuk hipotesis.

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan (Sugiyono, 2015:64). Hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Arikunto, 2002:64). Penelitian ini dapat disusun sebuah model hipotesis seperti gambar berikut ini.

Gambar 2.3 Model Hipotesis



Sumber : data diolah (2017)

Keterangan :

—————→ : Pengaruh Simultan

-----→ : Pengaruh Parsial

Berdasarkan model hipotesis diatas maka peneliti merumuskan beberapa hipotesis yaitu:

## **2.1 Hipotesis Penelitian**

### **2.1.1 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran terhadap Jumlah Tunggakan Pajak**

Surat teguran merupakan surat yang diterbitkan oleh pejabat pajak 7 hari setelah jatuh tempo pembayaran untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak agar melunasi utang pajaknya yang tertunggak. General deterrence dalam teori deterrence mengatakan bahwa efek pencegahannya diharapkan terjadi sebelum hukuman dijatuhkan. Pencegahan ini dilakukan melalui peringatanyang dijatuhkan secara terbuka sehingga orang lain dapat dicegah dari kemungkinan melakukan pelanggaran.

Dina Fatmadika, Heru Susilo dan Rosalita Rachma Agustin (2016:6) menyatakan bahwa “Surat teguran dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk mendorong upaya pencairan tunggakan pajak”. Begitu pula menurut Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh (2008:66) menyatakan bahwa “Surat Teguran diterbitkan untuk melunasi pembayaran tunggakan pajak”.

Melalui peringatan secara persuasif dengan surat teguran ini diharapkan agar wajib pajak segera melunasinya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibentuk yaitu:

H<sub>1</sub> : Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Y).

### **2.1.2 Pengaruh Penerbitan Surat Teguran terhadap Jumlah Tunggakan Pajak**

Apabila dalam waktu 21 hari sejak penerbitan surat teguran utang pajak masih belum dilunasi, maka akan diterbitkan surat paksa yaitu surat perintah yang bersifat lebih tegas untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Apabila cara persuasif tidak berhasil, dilakukan cara yang lebih tegas.

Menurut Waluyo (2011:89) menyatakan bahwa “Peningkatan jumlah tunggakan pajak tersebut seharusnya di imbangi dengan pencairannya. Untuk itu perlu tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa”. Begitu pula menurut Gunadi dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:94) menyatakan bahwa “Upaya Pencairan Tunggakan Pajak dilakukan melalui pelaksanaan tindakan penagihan secara intensif dalam set administrasi pajak yang baik akan lebih efektif melaksanakan upaya tersebut”.

Dengan dilakukannya tindakan yang lebih tegas melalui surat paksa, diharapkan semakin patuhnya wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dibentuk yaitu:

H<sub>2</sub> : Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2) berpengaruh secara parsial terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Y).

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Menurut Sugiyono (2015:7) Metode kuantitatif adalah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Berdasarkan jenis penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah pendekatan *explanatory research*. Menurut Asep Hermawan (2009:20) bahwa penelitian *explanatory research* merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dan lainnya. Pendekatan *explanatory research* dapat dikatakan sebagai penelitian untuk menguji hipotesis antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Berdasarkan definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa jenis penelitian menggunakan metode kuantitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa yang menjadi fenomena dalam bentuk angka. Mengukur variabel-variabel yang ada dalam penelitian seperti yang ada pada penelitian ini. Sedangkan alasan peneliti mengambil jenis pendekatan *explanatory research* karena bertujuan untuk mencari hubungan antara Pengaruh Penagihan Pajak menggunakan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Jumlah Tunggakan Pajak.



## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi merupakan tempat yang dipilih peneliti sebagai objek penelitian. Lokasi penelitian ini mengambil lokasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya yang bertempat di Komplek Araya Business Center Kav. 1, Jalan Raden Panji Suroso, Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan karena KPP Madya merupakan salah satu Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah Kota Malang yang memiliki jumlah tunggakan pajak, serta dalam melakukan penelitian peneliti mudah untuk mengakses pengambilan data dan penelitian tas objek yang diteliti.

## **C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel**

### **1. Variabel**

Menurut Sugiyono (2015:38) Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian untuk ditarik kesimpulannya. Penelitian ini telah menentukan variabel bebas dan variabel terikat sebagai berikut:

#### **a. Variabel Independen (Bebas)**

Menurut Sugiyono (2015:39) Variabel bebas (Independen) merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (Dependen). Penelitian ini terdapat dua variabel bebas yaitu sebagai berikut :

1) Surat Teguran (X1)

Surat teguran adalah surat yang diterbitkan oleh KPP untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya. Variabel surat teguran yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah surat teguran yang diterbitkan.

2) Surat Paksa (X2)

Surat Paksa adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh KPP dan dilakukan oleh juru sita untuk memaksa Wajib Pajak melunasi utang pajak dalam jangka waktu tertentu. Penagihan pajak dengan surat paksa, dalam hal ini dilihat dari jumlah surat paksa yang diterbitkan.

**b. Variabel Dependen (Terikat)**

Menurut Sugiyono (2015:39) Variabel terikat (Dependen) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Independen).

1) Jumlah Tunggakan Pajak (Y)

Jumlah tunggakan pajak adalah jumlah pokok pajak yang belum dilunasi berdasarkan STP yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang terutang, SKPKB, SKPKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah termasuk pajak yang seharusnya tidak dikembalikan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Variabel jumlah tunggakan pajak dilihat dari

jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT.

## 2. Definisi Operasional Variabel

Seperti yang telah dikemukakan oleh Nazir (2011:126) Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan atau memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut.

**Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel**

Konsep	Variabel	Indikator	Item
Penagihan Pajak	Surat Teguran (X <sub>1</sub> )	Surat Teguran	Surat Teguran yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah surat teguran yang diterbitkan
	Surat paksa (X <sub>2</sub> )	Surat Paksa	Surat Paksa yang diterbitkan dilihat dari banyaknya jumlah surat paksa yang diterbitkan
Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak (Y)	Jumlah Tunggakan Pajak	Jumlah Tunggakan Pajak dilihat dari jumlah pembayaran atas pajak yang terutang yang didasarkan pada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT.

*Sumber: Olahan Peneliti, 2017*

## D. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2015:215) Populasi merupakan wilayah generaliasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka populasi dalam penelitian tersebut adalah

jumlah Penagihan Pajak dan jumlah Surat Teguran selama 3 tahun mulai dari tahun 2014 sampai tahun 2016 di Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Malang.

## **2. Sampel**

Menurut Sarjono dan Jualita (2011 : 21) Sampel adalah bagian dari populasi yang dapat dipercaya mewakili. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling nonprobability. Menurut Sugiyono (2015:84) Nonprobability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sampel jenuh, yang dimaksud dengan sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini menggunakan data time series dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 atau selama 3 tahun dengan unit tahunan.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Menurut Darmawan (2013:159) Teknik pengumpulan data disini adalah cara-cara yang ditempuh dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan datanya. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Idrus (2007:113) menyatakan bahwa data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh langsung dari Kantor Pelayanan Pajak Madya di Kota Malang berupa laporan kinerja seksi penagihan, laporan penerimaan pajak, serta

data lain yang terkait. Data-data yang nantinya akan dianalisis dan ditarik kesimpulan, dikumpulkan dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data.

## **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan sebagainya menurut Arikunto (2012:274) . Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Pengumpulan data tersebut diperoleh dari dokumen-dokumen yang merupakan data olahan dari instansi terkait. Selain itu, data yang digunakan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel, dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian yang dilakukan ini dengan bantuan aplikasi yaitu Software SPSS.

### **1. Analisis Statistik Deskriptif**

Siregar (2014:2) menyatakan bahwa statistik deskriptif adalah statistik yang berkenaan dengan bagaimana cara mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan agar mudah dipahami. Lebih lanjut Sugiyono (2015:207) menjelaskan bahwa hasil dari uji statistik deskriptif adalah menyajikan data yang diperoleh melalui tabel, grafik, diagram, lingkaran, pictogram, perhitungan modus, mean, median, (pengukuran tendensi sentral), perhitungan

desil, presntil, perhitungan data melalui perhitungan rata rata dan standar deviasi, perhitungan presentase.

Statistik deskriptif juga dapat dilakukan untuk mencari kuatnya hubungan antar variabel melalui analisis kolerasi, melakukan prediksi dengan analisis regresi, dan membuat perbandingan dengan membandingkan rata rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis kolerasi, regresi, atau membandingkan dua nilai rata rata (populasi/sampel) atau lebih tidak perlu diuji signifikannya. Jadi secara teknis dapat diketahui bahwa, dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikasi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud untuk membuat generalisasi sehingga tidak ada kesalahan generalisasi.

Pada penelitian ini menggunakan seluruh data yang ada dalam populasi tanpa mengambil sebagian sampel. Data populasi tersebut umumnya masih mentah dan belum tertata dengan baik. untuk itu perlu dilakukan uji statistik deskriptif dengan tujuan menyajikan data yang telah diperoleh lebih matang dan tertata dengan baik.

## **2. Uji Asumsi Klasik**

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bisa dilakukan dengan menggunakan grafik dan menggunakan analisis statistik yaitu uji statistik non-parametrik kolmogorov-Smirnov (K-S). Arikunto (2012:262) menyebutkan uji normalitas digunakan untuk mengetahui bahwa data distribusi normal. Dari hasil pengujian normalitas juga dapat menunjukkan bahwa sampel yang diambil berdistribusi normal yaitu hampir berdistribusi normal.

Uji normalitas untuk mengetahui apakah sebaran data dalam suatu model regresi mengikuti atau mendekati distribusi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki sebaran data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni data tersebut tidak melenceng kekiri atau kekanan. “Pengujian ini secara praktis dilakukan lewat pembuatan grafik normal *probability plot* (Santoso, 2010:210). Deteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Menurut Santoso dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut (Santoso, 2010:213):

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Multikolonieritas menunjukkan adanya hubungan linier sempurna atau pasti diantara beberapa atau semua variabel penejlas dari model regresi. Menurut Sudarmanto (2013:224) uji asumsi tentang multikolinearitas ini dimaksudkan untuk membuktikan atau menguji ada tidaknya hubungan yang linear antara variabel bebas (independent) satu dengan variabel bebas (independent) yang lainnya. Sedangkan Menurut Ghozali (2009:91) uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel



bebas (independent). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independent.

Identifikasi secara statistik atau ada tidaknya multikolonieritas dapat dilakukan dengan menghitung *Variance Inflation Factor* (VIF) dengan rumus sebagai berikut :

$$VIF = \frac{1}{1 - R^2}$$

$R^2$  = Koefisien Determinasi

(Ghozali, 2009:28)

Pendeteksian terhadap multikolonieritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF dari hasil analisis regresi, jika  $VIF > 10$ , maka multikolonieritas tinggi pada persamaan regresi. Jika nilai  $VIF < 10$  dan besarnya toleransi  $> 0,05$  maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinieritas (Ghozali, 2009:28).

### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada hakekatnya menguji asumsi bahwa garis regresi produksi mempunyai keragaman atau variasi faktor pengganggu yang bersifat konstan untuk semua pengamatan. Menurut Ghozali (2005 : 105), pengujian ini bertujuan untuk “menguji apakah sebuah model regresi terjadi ketidak samaan varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. “Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika varians dari residual dari satu

pengamatan ke pengamatan yang lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Ghozali (2005:105), “Dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik sumbu X terhadap Y yang telah diprediksi”. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali,2005:105):

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik(poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Menurut Sudarmanto (2013:240) uji asumsi heterokedastisitas ini untuk mengetahui apakah variasi residual absolut sama atau tidak sama untuk semua pengamatan.

#### **d. Uji Autokolerasi**

Cara menguji apakah model regresi berganda ada kolerasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi maka dapat dipastikan mengalami masalah autokolerasi. Model regresi yang diharapkan adalah model regresi yang terlepas dari autokolerasi. Untuk mengecek autokolerasi digunakan uji Durbin Watson (D-W) . Penelitian dengan data yang baik adalah data penelitian yang tidak mengandung kolerasi positif maupun kolerasi negatif.

### 3. Uji Hipotesis

#### 1. Uji Simultan (F-test)

Uji simultan (uji F) ini dimaksudkan untuk mengukur tingkat signifikan pengaruh simultan variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Adapun langkah-langkah dalam perhitungan uji F sebagai berikut :

- a) Merumuskan hipotesis
- b) Menentukan nilai kritis atau  $F_{\text{tabel}}$  dengan menggunakan derajat kepercayaan 95% atau taraf signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05 dan *degree of freedom* (df) uji F, yaitu  $k_1$  (*numerator*) dan  $k_2$  (*denomonator*)

- c) Menentukan  $F_{\text{hitung}}$

Rumus yang dipergunakan adalah :

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2(n - m - 1)}{M(1 - R^2)}$$

Dimana :

$n$  : banyak sampel

$m$  : banyak variabel bebas

- d) Mengambil keputusan dengan cara sebagai berikut :

- a) Membandingkan  $F_{\text{hitung}}$  dengan  $F_{\text{tabel}}$

Jika  $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$ , maka  $H_0$  ditolak

- b) Berdasarkan tingkat signifikan/probabilitas

Jika tingkat signifikan/probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak

- c) Kesimpulan

Dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  atau Probabilitas Hitung dengan *Level of Significance* selanjutnya ditarik kesimpulan.

## 2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi merupakan ukuran kesesuaian garis regresi linier berganda terhadap suatu data (Hasan, 2002:270). Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 sampai 1. Semakin mendekati 0 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin kecil pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dengan kata lain semakin kecil kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 1 besarnya koefisien determinasi suatu persamaan regresi, semakin besar pula pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Jadi dengan kata lain semakin besar kemampuan model regresi yang dihasilkan dalam menjelaskan perubahan nilai variabel dependen.

## 3. Uji Parsial ( t-test)

Uji parsial (uji t) ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara individual (parsial) terhadap variabel dependen. Adapun langkah-langkah dalam melakukan uji t adalah sebagai berikut :

- a) Merumuskan hipotesis
- b) Menentukan nilai kritis atau t table

Menggunakan *degree of freedom* (df) =  $t(n-2; \alpha/2)$

Dengan tingkat signifikan ( $\alpha$ ) = 0,05, oleh karena pengujian dilakukan dengan dua sisi, maka  $\alpha$  yang dilakukan adalah  $\alpha/2$

- c) Menentukan t hitung

d) Mengambil keputusan dengan langkah sebagai berikut

1) Membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$

Jika  $t_{hitung} \leq -t_{tabel}$  atau  $t_{hitung} \geq +t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak

2) Berdasarkan tingkat signifikan/probabilitas

Jika  $\text{Sig } F < \text{Sig } \alpha$  maka  $H_0$  ditolak

e) Kesimpulan

Dengan membandingkan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  atau Probabilitas Hitung dengan *Level of Significance* selanjutnya ditarik kesimpulan.

#### 4. Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Sugiono (2010:277) bahwa “analisis regresi berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya)”. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua.

Rumus linier berganda ditunjukkan oleh persamaan :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y = Jumlah tunggakan pajak

a = Kostanta

b1 = Koefisien surat teguran

b2 = Koefisien surat paksa

X1 = Surat teguran

X2 = Surat paksa

e = Faktor Pengganggu

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang, terletak di Kompleks Araya Business Center Kavling 1, Jalan Panji Suroso, Arjosari, Malang. Dibangun di atas lahan seluas 3000 m<sup>2</sup> dengan desain minimalis modern, KPP Madya Malang dirancang berbeda dengan bangunan instansi pemerintah pada umumnya. Desain yang luwes dan ramah lengkap dengan berbagai fasilitas penunjang diharapkan mampu memberikan suasana yang bersahabat bagi para Wajib Pajak.

Berdiri sejak Tahun 2007, KPP Madya Malang merupakan salah satu perwujudan dari proses modernisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, ditetapkan Saat Mulai Operasi (SMO) dari KPP Madya Malang mulai tanggal 9 April 2007.

##### **2. Visi dan Misi KPP Madya Malang**

KPP Madya Malang sebagai instansi pemerintah mempunyai visi dan misi seperti instansi pemerintah lainnya. Visi dan misi yang dimiliki sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang positif. Adapun visi dan misi KPP Madya Malang, yaitu:



a. Visi

Menjadi Kantor Pelayanan Pajak Terbaik, yang menggunakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dipercaya dan dibanggakan masyarakat.

b. Misi

Dapat melayani masyarakat dalam bidang perpajakan dengan pelayanan yang *excellent* dan adil dan mampu turut serta mewujudkan kemandirian pembiayaan negara sesuai dengan potensi yang ada.

**3. Wajib Pajak dan Wilayah Kerja KPP Madya Malang**

KPP Madya Malang mengadministrasikan WP Badan tertentu yang berdomisili di seluruh wilayah kerja Kanwil DJP Jawa Timur III. Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP Madya Malang hingga saat ini berjumlah 1475 WP. Wilayah Kerja KPP Madya Malang membentang dari bagian tengah, timur dan selatan dari Provinsi Jawa Timur yang mencakup 14 kota/kabupaten. Berikut ini adalah rincian dari 14 kota/kabupaten tersebut, yaitu:

1. Malang (3675 km<sup>2</sup>)
2. Batu (137 km<sup>2</sup>)
3. Pasuruan (1474 km<sup>2</sup>)
4. Probolinggo (1721 km<sup>2</sup>)
5. Jember (3293 km<sup>2</sup>)

6. Lumajang (1790 km<sup>2</sup>)
7. Situbondo (1670 km<sup>2</sup>)
8. Bondowoso (1526 km<sup>2</sup>)
9. Banyuwangi (5782 km<sup>2</sup>)
10. Blitar (1588 km<sup>2</sup>)
11. Kediri (1026 km<sup>2</sup>)
12. Tulungagung (1055 km<sup>2</sup>)
13. Trenggalek (1261 km<sup>2</sup>)
14. Nganjuk (1244 km<sup>2</sup>)

#### **4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi KPP Madya Malang**

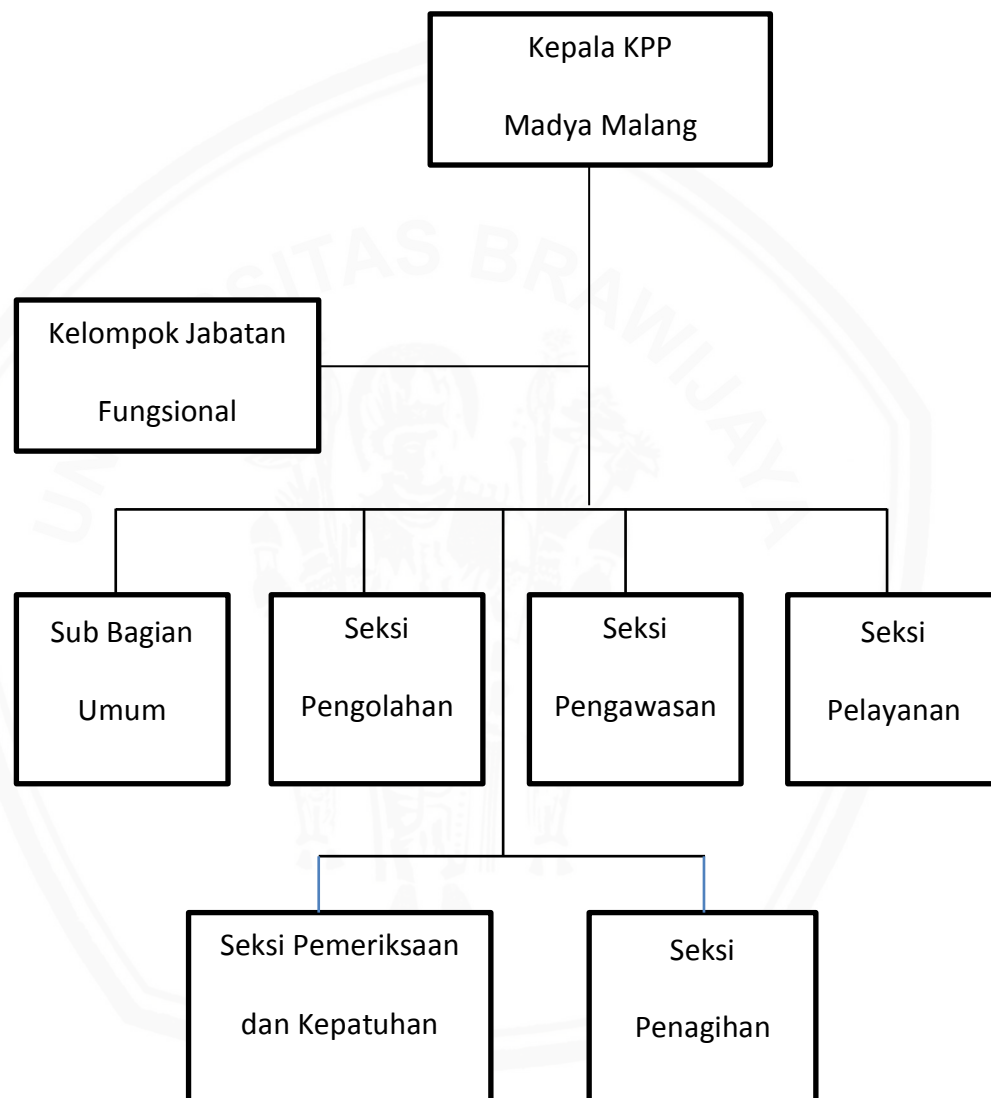
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006, KPP Madya Malang mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPP Madya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

KPP Madya Malang dalam melaksanakan fungsi tersebut terbagi menjadi beberapa seksi, subbagian dan kelompok fungsional pemeriksa, sebagaimana digambarkan pada struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan pola yang menggambarkan adanya bagian-bagian, fungsi serta wewenang dan tanggungjawab yang ada dalam suatu organisasi secara rinci, jelas dan teratur. Setiap pola dalam masing-masing pegawai pemilik kewajiban dan tanggungjawab terhadap bagian yang telah terstruktur dimana fungsi struktur organisasi tersebut memberi kemudahan untuk masing-masing bagian dalam menjalankan tugasnya. Berikut adalah struktur organisasi KPP Madya Malang :

Gambar 4.1 Bagan Struktur Organisasi



(Sumber: Data Internal KPP Madya Malang, 2016)

## **5. Uraian Jabatan Struktur Organisasi KPP Madya Malang**

Setiap jabatan yang ada pada struktur organisasi di KPP Madya Malang mempunyai tugasnya masing-masing. Berikut ini akan dijabarkan tugas dari masing-masing jabatan tersebut:

### **1. Kepala Kantor KPP Madya Malang**

Kepala Kantor KPP Madya Malang mempunyai tugas untuk mengelola pelaksanaan, penyuluhan, pelayanan dan mengawasi WP di bidang perpajakan dalam wilayah kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **2. Sub bagian umum**

Sub bagian umum melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

### **3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi**

Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

### **4. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat

lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

5. Sub bagian umum

Sub bagian umum melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga.

6. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, serta penyiapan laporan kinerja.

7. Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

8. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak,

9. Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran



Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

10. Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) I, II, III dan IV

Seksi Pengawasan Dan Konsultasi (Waskon) I, II, III dan IV melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak serta evaluasi hasil banding.

11. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Deskripsi Data Penelitian**

Sebelum dilakukan analisis, pada tabel 4.1 ini akan dijabarkan data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini. Data yang diperoleh antara lain Surat Teguran (jumlah Surat Teguran yang telah diterbitkan), Surat Paksa (jumlah Surat Paksa yang telah diterbitkan) dan jumlah tunggakan pajak (piutang pajak) di KPP (Kantor Pelayanan Pajak) Madya Malang selama 36 bulan (3 tahun), terhitung mulai tahun 2014 sampai dengan 2016.

### C. Hasil Statistik Deskriptif

Berikut pada tabel 4.1 akan disajikan tabel hasil statistik deskriptif dari masing-masing variabel

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Jumlah tunggakan pajak (Y)	36	21.76	23.64	22.4731	.62918
Surat Teguran ( $X_1$ )	36	2.40	5.41	4.1092	.70890
Surat Paksa ( $X_2$ )	36	3.04	5.67	4.2402	.67213
Valid N (listwise)	36				

Sumber : data diolah (2017)

- Untuk variabel Y Jumlah Tunggakan Pajak (Saldo piutang) bahwa nilai minimum dan maksimum untuk variabel Jumlah Tunggakan Pajak adalah sebesar 21,76 dan 23,64 sedangkan nilai rata-rata dan standart deviasinya sebesar 22,4731 dan 0,62918
- Untuk variabel  $X_1$  ST (Surat Teguran) bahwa nilai minimum dan maksimum untuk variabel Surat Teguran adalah sebesar 2,40 dan 5,41 sedangkan nilai rata-rata dan standart deviasinya sebesar 5,41 dan 4,1092
- Untuk variabel  $X_2$  SP (Surat Paksa) bahwa nilai minimum dan maksimum untuk variabel Surat Paksa adalah sebesar 3,04 dan 5,67 sedangkan nilai rata-rata dan standart deviasinya sebesar 4,2402 dan 0,67213

### D. Pengujian Asumsi Klasik

Asumsi-asumsi klasik ini dilakukan pengujiannya untuk memenuhi penggunaan regresi linier berganda. Dari hasil perhitungan tersebut dilakukan perhitungan regresi berganda melalui alat bantu SPSS for Windows, untuk uji

asumsi klasik regresi. Dalam penelitian ini terdapat variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

- a) Variabel Independent (X), yaitu :

X1 = Surat Teguran

X2 = Surat Paksa

- b) Variabel Dependent (Y) yaitu Jumlah Tunggakan Pajak (piutang)

Adapun pengujian asumsi klasik ada 4 (empat), yaitu :

### 1. Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki sebaran data yang mempunyai pola seperti distribusi normal, yakni data tersebut tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Untuk menguji asumsi ini, dapat digunakan metode Kolmogorov-Smirnov dan dapat dituangkan ke dalam grafik P-Plot. Sedangkan untuk mendeteksi normalitas dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Menurut Santoso dasar pengambilan keputusan uji normalitas adalah sebagai berikut :

- a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji ini dilakukan untuk mengetahui nilai residual tersebar normal atau tidak. Dalam melakukan Prosedur uji ini dilakukan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dengan ketentuan sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan :

$H_0$  : residual tersebar normal

$H_1$  : residual tidak tersebar normal

Jika nilai **sig.** (*p-value*) > maka  $H_0$  diterima yang artinya normalitas terpenuhi.

Hasil uji normalitas dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			36
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean		.0000000
	Std. Deviation		.43879679
Most Extreme Differences	Absolute		.084
	Positive		.084
	Negative		-.055
Kolmogorov-Smirnov Z			.506
Asymp. Sig. (2-tailed)			.960

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

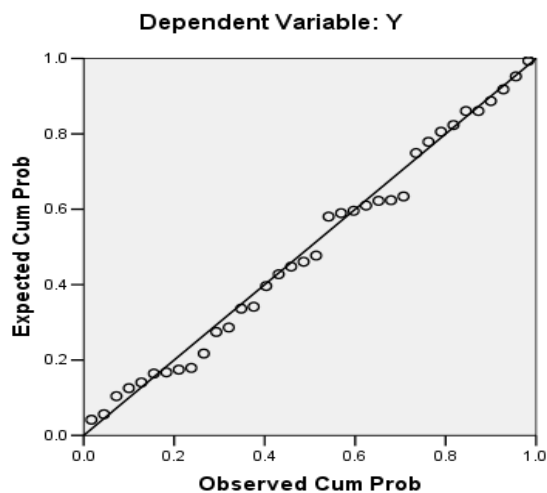
*Sumber: data diolah (2017)*

Dari hasil perhitungan didapat nilai **sig.** sebesar 0.960 (dapat dilihat pada Tabel 4.2) atau lebih besar dari 0.05; maka ketentuan  $H_0$  diterima yaitu bahwa asumsi normalitas terpenuhi.

Jika nilai residual dituangkan dalam sebuah grafik P-Plot, maka terlihat bahwa plot dari residual tersebut membentuk suatu pola yang mendekati garis lurus seperti pada gambar 4.2. Pola seperti pada gambar 4.2 mengindikasikan bahwa residual berdistribusi normal.

Gambar 4.2 Grafik P-Plot Uji asumsi Normalitas

## Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : data diolah (2017)

### Secara Deskriptif

Residual menyebar disekitar garis diagonal, sehingga residual menyebar normal. Jadi, Asumsi normalitas terpenuhi.

### Secara Inferensial

Dari pengujian menggunakan uji normalitas, didapatkan nilai P-Value > Sig  $\alpha$  ; Sehingga  $H_0$  diterima, residual menyebar normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas ini dilakukan untuk mengetahui bahwa tidak terjadi hubungan yang sangat kuat atau tidak terjadi hubungan linier yang sempurna atau dapat pula dikatakan bahwa antar variabel bebas tidak saling berkaitan. Cara pengujiannya adalah dengan membandingkan nilai Toleransi yang didapat dari

perhitungan regresi berganda, apabila nilai tolerance  $< 0,1$  maka terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat pada Tabel 4.3

Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	0.996	1.004
X2	0.996	1.004

*Sumber: Data primer diolah (2017)*

Berdasarkan Tabel 4.3, berikut hasil pengujian dari masing-masing variabel bebas:

- a) Tolerance untuk Surat Teguran adalah 0.996
- b) Tolerance untuk Surat Paksa adalah 0.996

Pada hasil pengujian didapat bahwa keseluruhan nilai tolerance  $> 0,1$  sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

Uji multikolinearitas dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan nilai VIF (Variance Inflation Faktor) dengan angka 10. Jika nilai VIF  $> 10$  maka terjadi multikolinearitas. Berikut hasil pengujian masing-masing variabel bebas :

- a) VIF untuk Surat Teguran adalah 1,004
- b) VIF untuk Surat Paksa adalah 1,004

Dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas. Dengan demikian uji asumsi tidak adanya multikolinearitas dapat terpenuhi.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Dalam hal ini dilakukan pengujian apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain berbeda disebut heteroskedastisitas. Adapun dasar pengambilan keputusan :

- a) Jika ada pola tertentu seperti titik-titik (poin-poin) yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas.
- b) Jika ada pola garis yang jelas, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

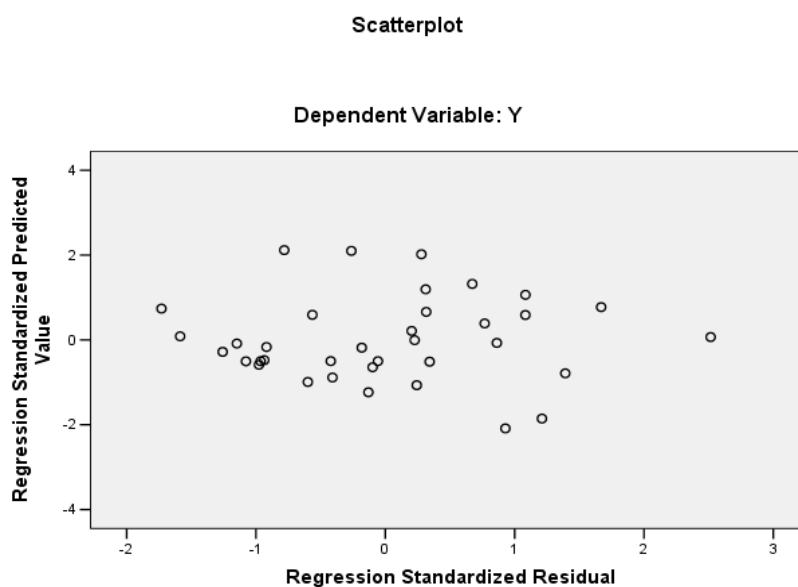
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan nilai simpangan residual akibat besar kecilnya nilai salah satu variabel bebas atau adanya perbedaan nilai ragam dengan semakin meningkatnya nilai variabel bebas. Prosedur uji dilakukan dengan Uji Scatter Plot. Pengujian kehomogenan ragam sisaan dilandasi pada hipotesis:

$H_0$  : ragam sisaan homogen

$H_1$  : ragam sisaan tidak homogen



Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas



*Sumber: Data primer diolah (2017)*

Dari hasil pengujian tersebut didapat bahwa diagram tampilan *scatterplot* menyebar dan tidak membentuk pola tertentu maka tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sisaan mempunyai ragam homogen (konstan) atau dengan kata lain tidak terdapat gejala heterokedastisitas.

#### 4. Autokorelasi

Pengujian asumsi klasik yang terakhir adalah autokorelasi. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Deteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat besaran Durbin-Watson (D-W), setelah itu dilihat nilai kritis uji Durbin-Watson. Dalam penelitian ini, uji autokorelasi (uji Durbin-Watson) menggunakan  $\alpha = 0,05$ .

Tabel 4.4 Output Pengujian Autokorelasi

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 <sup>a</sup>	.514	.484	.45190	.960

a. Predictors: (Constant),  $X_2$ ,  $X_1$

b. Dependent Variabel: Y

Sumber : Data diolah (2017)

Dari hasil analisis diatas pada tabel *Model Summary*, terdapat nilai Durbin-Watson sebesar 0.960, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

Setelah dilakukan 4 (empat) pengujian klasik diatas, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah bebas dari masalah multikolonieritas, heterokedastisitas, dan telah memenuhi asumsi normalitas dan asumsi autokorelasi. Jadi dapat diambil interpretasi dari hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan.

## E. Pengujian Hipotesis

### 1. Uji Simultan (Uji F)

Langkah pengujian selanjutnya adalah uji simultan (uji F) yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel independen yaitu variabel Surat Teguran ( $X_1$ ) dan variabel Surat Paksa ( $X_2$ ) yang secara keseluruhan (simultan) berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu variabel Jumlah Tunggalan Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Pengujian F atau pengujian model digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak, dengan kata lain model yang diduga tepat/sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Jadi jika hasilnya tidak signifikan, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

Pada tabel 4.5 di bawah ini akan disajikan hasil uji simultan (uji F).

Tabel 4.5 Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA <sup>b</sup>					
Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7.116	2	3.558	17.424	.000 <sup>a</sup>
Residual	6.739	33	.204		
Total	13.855	35			

a. Predictors: (Constant),  $X_2$ ,  $X_1$

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2017)

Berdasarkan Tabel 4.5 nilai F hitung sebesar 17,424. Sedangkan F tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db regresi = 2 : db residual = 33) adalah sebesar 3,285. Karena F hitung > F tabel yaitu  $17,424 > 3,285$  atau nilai sig F ( $0,000 < \alpha = 0.05$ ) maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Jumlah Tunggakan Pajak) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Surat Teguran ( $X_1$ ), Surat Paksa ( $X_2$ )).

## 2. Koefisien Determinasi

Untuk mengetahui besar kontribusi variabel bebas (Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ )) terhadap variabel terikat (Jumlah Tunggakan Pajak) digunakan nilai koefisien determinasi, Koefisien determinasi digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh atau kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat. Pada tabel 4.6 ini disajikan hasil koefisien determinasi :

Tabel 4.6 Koefisien determinasi

Model Summary <sup>b</sup>				
Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.717 <sup>a</sup>	.484	.45190	.960

a. Predictors: (Constant),  $X_2$ ,  $X_1$

b. Dependent Variable: Y

Sumber : data diolah (2017)

Dari analisis pada Tabel 4.6 diperoleh hasil adjusted  $R^2$  (koefisien determinasi) sebesar 0,484. Artinya bahwa 48,4% variabel Jumlah Tunggakan Pajak akan dipengaruhi oleh variabel bebasnya, yaitu Surat Teguran( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ). Sedangkan sisanya 51,6% variabel Jumlah Tunggakan Pajak akan dipengaruhi oleh variabel-variabel yang lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Jadi koefisien determinasi juga didapat koefisien korelasi yang menunjukkan besarnya hubungan antara variabel bebas yaitu Surat Teguran dan Surat Paksa dengan variabel Jumlah Tunggakan Pajak, nilai R (koefisien korelasi) sebesar 0.717, nilai korelasi ini menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas yaitu Surat Teguran ( $X_1$ ) dan Surat Paksa ( $X_2$ ) dengan Jumlah Tunggakan Pajak termasuk dalam kategori kuat karena berada pada selang 0,6 – 0,8.

Tabel 4.7 Interval Koefisien

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,00 – 0,20	Sangat rendah
0,20 – 0,40	Rendah
0,40 – 0,60	Sedang
0,60 – 0,80	Kuat
0,80 – 1,00	Sangat kuat

Sumber : data diolah (2017)

### 3. Uji Parsial (Uji t)

Setelah diketahui dari hasil uji F bahwa Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2) berpengaruh secara simultan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang, maka selanjutnya akan dilakukan uji parsial (uji t). Uji parsial (Uji t) ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa terhadap jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang. Pada tabel 4.8 di bawah ini disajikan regresi linier berganda :

Tabel 4.8 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients <sup>a</sup>					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.682	.640		33.881	.000
X <sub>1</sub>	-.385	.108	-.434	-3.564	.001
X <sub>2</sub>	.559	.114	.598	4.913	.000

a. Dependent Variable : Y

Sumber : data diolah (2017)

Dari hasil uji t (test) uji parsial digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan

terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika  $t$  hitung  $> t$  tabel atau  $-t$  hitung  $< -t$  tabel maka hasilnya signifikan. Sedangkan jika  $t$  hitung  $< t$  tabel atau  $-t$  hitung  $> -t$  tabel maka hasilnya tidak signifikan.

Berdasarkan Tabel 4.8 diperoleh hasil sebagai berikut :

- a)  $t$  test antara  $X_1$  (Surat Teguran) dengan  $Y$  (Jumlah Tunggakan Pajak) menunjukkan  $t$  hitung = 3,564. Sedangkan  $t$  tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual = 33) adalah sebesar 2,035. Karena  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $3,564 > 2,365$  atau nilai  $\text{sig } t(0,000) < \alpha = 0.05$  maka pengaruh  $X_1$  (Surat Teguran) terhadap Jumlah Tunggakan Pajak adalah signifikan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Jumlah Tunggakan Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Surat Teguran atau dengan meningkatkan Surat Teguran maka Jumlah Tunggakan Pajak akan berkurang.
- b)  $t$  test antara  $X_2$  (Surat Paksa) dengan  $Y$  (Jumlah Tunggakan Pajak) menunjukkan  $t$  hitung = 4,913. Sedangkan  $t$  tabel ( $\alpha = 0.05$  ; db residual = 33) adalah sebesar 2,035. Karena  $t$  hitung  $> t$  tabel yaitu  $4,913 > 2,365$  atau nilai  $\text{sig } t(0,000) < \alpha = 0.05$  maka pengaruh  $X_2$  (Surat Paksa) terhadap Jumlah Tunggakan Pajak adalah signifikan pada alpha 5%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Jumlah Tunggakan Pajak dapat dipengaruhi secara signifikan oleh Surat Paksa atau dengan meningkatkan Surat Paksa maka Jumlah Tunggakan Pajak akan berkurang.

## F. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi ini digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antara variabel bebas, yaitu Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2) terhadap variabel terikat yaitu Jumlah Tunggakan Pajak (Y).

### 1. Persamaan Regresi

Persamaan regresi digunakan mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Dengan menggunakan bantuan SPSS for Windows ver 20.00 didapat model regresi seperti pada Tabel 4.9 :

Tabel 4.9 : Rekapitulasi Hasil Regresi

Variabel Terikat	Variabel bebas	Unstandardized Coefficients	Beta (Standardized Coefficients)	t hitung	Sig.	Keterangan
Y	(Constant)	21.682		33.881	0.000	Signifikan
	X1	-0.385	-0.434	-3.564	0.001	Signifikan
	X2	0.559	0.598	4.913	0.000	Signifikan
Alfa		5%				
R		0.717				
R Square		0.514				
Adjusted R Square		0.484				
F Hitung		17,424				
Sig. F		0.000				
F Tabel		3.285				
t Tabel		2.035				

Berdasarkan pada Tabel 4.9 didapatkan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 21,682 - 0,385 X1 + 0,559 X2$$

Dari persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a) Rata – rata Jumlah Tunggakan Pajak sebesar 21,682, jika Variabel bebas tidak ada



- b) Jumlah Tunggakan Pajak akan menurun sebesar 0,385 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_1$  (Surat Teguran). Jadi apabila Surat Teguran mengalami peningkatan 1 satuan, maka Jumlah Tunggakan Pajak akan menurun sebesar 0,385 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.
- c) Jumlah Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar 0,559 satuan untuk setiap tambahan satu satuan  $X_2$  (Surat Paksa), Jadi apabila Surat Paksa mengalami peningkatan 1 satuan, maka Jumlah Tunggakan Pajak akan meningkat sebesar 0,559 satuan dengan asumsi variabel yang lainnya dianggap konstan.

Berdasarkan interpretasi di atas, dapat diketahui bahwa Surat Teguran dan Surat Paksa meningkat maka akan diikuti peningkatan Jumlah Tunggakan Pajak.

#### **G. Hasil Uji Dominan**

Untuk menentukan variabel independen yang paling berpengaruh terhadap variabel  $Y$ , dapat dilakukan dengan membandingkan koefisien regresi ( $\beta$ ) antara variabel yang satu dengan yang lain. Variabel independen yang paling dominan pengaruhnya terhadap variabel  $Y$  adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar.

Untuk membandingkan koefisien regresi masing-masing variabel independen, disajikan tabel peringkat sebagai berikut:

Tabel 4.10 Hasil Uji Dominan

Peringkat	Variabel	Koefisien $\beta$	Pengaruh
2	$X_1$	-0.434	Signifikan
1	$X_2$	0.598	Signifikan

Sumber : Data Primer Diolah (2017)

Berdasarkan pada Tabel 4.10 tersebut, variabel Surat Paksa adalah variabel yang memiliki koefisien regresi yang paling besar. Artinya, variabel Y lebih banyak dipengaruhi oleh variabel Surat Paksa. Koefisien yang dimiliki oleh variabel Surat Paksa bertanda positif, hal ini menunjukkan adanya hubungan yang searah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik variabel Surat Paksa maka semakin meningkatkan Jumlah Tunggakan Pajak (Y).

## H. Analisis dan Pembahasan

### 1. Interpretasi

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa untuk :

#### a. Variabel $X_1$ (Surat Teguran)

Koefisien regresi variabel  $X_1$  (Surat Teguran) bertanda positif (+), hal ini menunjukkan ada hubungan yang searah sehingga dapat disimpulkan semakin baik variabel Surat Teguran maka semakin meningkatkan Jumlah Tunggakan Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang akan meningkat dan begitu pula sebaliknya.

b. Variabel X2 (Surat Paksa)

Sama halnya dengan X1, Koefisien regresi variabel X2 Surat Paksa bertanda positif (+), hal ini menunjukkan ada hubungan yang searah sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin baik variabel Surat Paksa maka semakin meningkatkan Jumlah Tunggakan Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang akan meningkat dan begitu pula sebaliknya.

## 2. Kaitan Temuan dengan Pengetahuan atau Teori

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam pelunasan utang Siahaan (2004:388) menyatakan bahwa “Surat Teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya”. Sedangkan pengertian dari surat lain yang sejenis meliputi surat atau bentuk lain yang memiliki fungsi sama dengan Surat Teguran atau Surat Peringatan dalam upaya penagihan pajak sebelum Surat Paksa diterbitkan. UndangUndang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimaksud dengan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.

Berdasarkan teori diatas, diperoleh suatu hipotesis yaitu Surat Teguran (X1) berpengaruh terhadap Jumlah Tunggakan Pajak (Y) yang didefinisikan dengan wajib pajak melunasi hutangnya dibayarkan tepat waktu. Dari hasil uji t,

diketahui bahwa  $H_0$  ditolak, yang artinya Jumlah tunggakan pajak di KPP Madya Malang tidak dipengaruhi oleh surat teguran. Sedangkan pada koefisien regresi variabel Surat Teguran ( $X_1$ ) sebesar 3,564 dan bertanda positif, maka dapat dikatakan bahwa peningkatan surat teguran yang diikuti oleh jumlah tunggakan pajak atau penurunan surat teguran yang diikuti oleh jumlah tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang.

Surat Paksa memiliki kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Mardiasmo, 2011:127). Menurut Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor.85/PMK.03/2010 tentang tata Cara Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Seketika dan Sekaligus, menyebutkan bahwa “Surat Paksa diterbitkan oleh pejabat setelah 21 (dua puluh satu) hari sejak penyampaian Surat Teguran, dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita kepada penanggung pajak”.

Dari uraian diatas diperoleh hipotesis bahwa Surat Paksa pada KPP Madya Malang dipengaruhi oleh faktor Surat Paksa ( $X_2$ ) berpengaruh terhadap Jumlah Tunggakan Pajak ( $Y$ ) yang didefinisikan dengan wajib pajak melunasi hutangnya dibayarkan tepat waktu. Dari hasil uji t, diketahui bahwa  $H_0$  ditolak, yang artinya Jumlah tunggakan pajak di KPP Madya Malang tidak dipengaruhi oleh surat paksa. Sedangkan Koefisien regresi Surat Paksa ( $X_2$ ) sebesar 4,913 bertanda positif mempunyai arti bahwa setiap penambahan satu satuan unit  $X_2$  (jumlah surat paksa) akan meningkatkan nilai  $Y$  (jumlah tunggakan pajak).

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah jumlah tunggakan pajak di KPP Madya Malang dipengaruhi oleh penagihan pajak dengan menggunakan surat teguran dan surat paksa baik secara simultan maupun parsial. Variabel Surat Teguran dan Surat Paksa yang ditandai dengan Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran, sedangkan Variabel Jumlah Tunggakan Pajak ditandai dengan sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel mana yang mempunyai pengaruh pada Jumlah Tunggakan Pajak. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan adalah variabel Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2) sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah Jumlah Tunggakan Pajak (Y).

Berdasarkan pada penghitungan analisis regresi linier berganda pada hasil uji statistik, diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh secara simultan (bersama-sama) tiap variabel bebas terhadap Jumlah Tunggakan Pajak dilakukan dengan pengujian F-test. Dari hasil analisis regresi linier berganda diperoleh variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan secara simultan terhadap Jumlah Tunggakan

Pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengujian terhadap hipotesis yang menyatakan bahwa adanya pengaruh secara bersama-sama (simultan) variabel bebas terhadap variabel Jumlah Tunggakan Pajak dapat diterima.

2. Untuk mengetahui pengaruh secara individu (parsial) variabel bebas (Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2)) terhadap Jumlah Tunggakan Pajak dilakukan dengan pengujian t-test. Berdasarkan pada hasil uji didapatkan bahwa terdapat lima variabel yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak yaitu Surat Teguran (X1) dan Surat Paksa (X2)
3. Berdasarkan pada hasil uji t didapatkan bahwa variabel Surat Paksa mempunyai nilai t hitung dan koefisien beta yang paling besar. Sehingga variabel Surat Paksa mempunyai pengaruh yang paling kuat dibandingkan dengan variabel yang lainnya maka variabel Surat Paksa mempunyai pengaruh yang dominan terhadap Jumlah Tunggakan Pajak .

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pihak-pihak lain. Adapun saran yang diberikan, antara lain:

1. Dari hasil analisis diketahui bahwa dengan adanya penagihan pajak menggunakan surat teguran dan surat paksa berpengaruh terhadap jumlah tunggakan pajak. Oleh karena itu, di harapkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang menerbitkan surat teguran atau surat lainnya

dari pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

2. Melakukan reformasi dari segi administrasi perpajakan termasuk peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat melalui kampanye sadar peduli pajak dan penegakan huku melalui pemeriksaan dan penagihan pajak aktif.
3. Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Malang untuk melakukan reformasi di bidang sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas aparat pajak agar tercipta aparat yang profesional, jujur dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidangnya.
4. Mengingat variabel bebas dalam penelitian ini merupakan hal yang sangat penting dalam mempengaruhi Jumlah Tunggakan Pajak diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan penelitian ini dengan mempertimbangkan variabel-variabel lain yang merupakan variabel lain diluar variabel yang sudah masuk dalam penelitian ini.

### **C. Keterbatasan**

Dalam penelitian ini terdapat keterbatasan yang memungkinkan akan mempengaruhi hasil akhir dari penelitian ini. Keterbatasan tersebut misalnya dalam menentukan variabel independen (X) yang merupakan surat penagihan pajak yaitu terdiri dari surat teguran dan surat paksa. Sehingga dalam hal ini terdapat 2 variabel yang mempunyai tujuan yang sama dari bagian surat



penagihan pajak. Oleh karena itu, diharapkan peneliti selanjutnya melakukan penelitian yang lebih luas sehingga dapat membandingkan dengan variabel lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asep, Hermawan. 2009. *Penelitian Bisnis : Paradigma Kuantitatif*. Jakarta : Grasindo.
- Dina Fatmadika, Heru dan Rosalita Rachma Agustin. 2016. *Pengaruh Surat Teguran terhadap Pencairan Tunggakan Pajak dengan Surat Paksa sebagai Variabel Intervening*. Jurnal Perpajakan (JEJAK). Vol. 9 No. 1 2016.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Gunadi. 2004. *Bunga Rampai Pemeriksaan Penyidikan & Penagihan Pajak*. Jakarta : PT. Multi Utama Indojasa
- H. Moeljo Hadi. 2001. *Dasar-dasar Penagihan Pajak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal.2.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Hukum Pidana Nasional dan internasional*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005)
- Iiyas, Wirawan B. Dan Rudy Suhartono. 2013. *Perpajakan: Pembahasan Lengkap Berdasarkan Perundang-undangan dan aturan pelaksanaan Terbaru Ed. 2*, Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPPE-Yogyakarta
- Kurniawan, Panca dan Bagus Pamungkas. 2006. *Penagihan Pajak di Indonesia*. Malang: Banyumedia.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi.
- Muhammad Awal Satrio Nugroho dan Bambang Teguh. 2008. *Hak dan Kewajiban dalam Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : salemba Empat
- Priantara, Diaz 2013. *Perpajakan Indonesia* Ed.2. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Rahayu, Siti Kurnia. 2008. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

———. 2014. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

Soemitro, Rochmat. 1991. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. Bandung: Eresco.

Siahaan, P. Marihot. 2004. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban, dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono, Prof. Dr. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia Edisi 10 Buku 1*. Penerbit Salemba Empat : jakarta

#### **Peraturan:**

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 8.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, Pasal 1 angka 9.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor. 24/PMK.03/2008 *sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor.85/PMK.03/2010 tentang Tata cara Pelaksanaan penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*

Keputusan Menteri Keuangan Nomor.561/KMK/2000 *tentang Tata cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa*

#### **Internet :**

[www.slideserve.com/trang/alur-dan-jadwal-pelaksanaan-penagihan-pajak](http://www.slideserve.com/trang/alur-dan-jadwal-pelaksanaan-penagihan-pajak)

#### **Jurnal dan Skripsi :**

- Primero, Rizki Yuslam. *Pengaruh Pemeriksaan pajak dan Penagihan Pajak terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Surakarta)*. Skripsi. 2015. Universitas Muhamadiyah Surakarta
- Velayati, Mala Rizkika. 2013. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Tindakan Penagihan Pajak Aktif dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Sebagai Upaya Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal Administrasi Bisnis. Fakultas Ilmu Administrasi. Universitas Brawijaya.  
[Http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id](http://administrasibisnis.studentjournal.ub.ac.id)
- Rifqiansyah, Hasbi. *Analisis efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara Tahun 2011-2013)*. Skripsi. 2014. Malang. Universitas Brawijaya

